

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penulisan.....	7
3. Manfaat Penulisan	8
3.1 Manfaat Bagi Akademisi.....	8
3.2 Manfaat Bagi Praktisi.....	8
3.3 Manfaat Bagi Masyarakat.....	8
4. Tinjauan Pustaka.....	8
4.1 Wewenang.....	8
4.2 Kebijakan Impor beras.....	14

4.3	Diskresi.....	15
4.4	Tanggung jawab.....	21
5.	Metode Penelitian	23
5.1	Tipe Penelitian Hukum.....	23
5.2	Pendekatan.....	24
5.3	Sumber bahan Hukum.....	25
5.4	Metode pengumpulan bahan Hukum.....	28
5.5	Analisis bahan Hukum.....	28
6.	Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KEABSAHAN WEWENANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN		
	DALAM IMPOR BERAS.....	31
2.1	Landasan Yuridis Wewenang Impor Beras Oleh Kementerian Perdagangan.....	31
2.2	Elemen Penggunaan Wewenang Kementerian Perdagangan dalam Impor beras.....	36
2.3	Prinsip-prinsip Penggunaan Wewenang.....	43
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN		
	DALAM IMPOR BERAS.....	50
3.1	Diskresi Kementerian Perdagangan dalam Impor Beras.....	50
3.2	Prosedur Penyelesaian Konflik norma dalam Impor beras.....	59
3.3	Pertanggungjawaban Diskresi Kementerian Perdagangan dalam Impor Beras.....	63
BAB IV PENUTUP.....		
		74

4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran.....	76

DAFTAR BACAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90).